



TELUSURI TEMUAN BPK RI Dewan Sepakat Bentuk Pansus PAD

YOGYA (KR) - Kalangan DPRD Kota Yogya akhirnya sepakat membentuk panitia khusus (pansus) guna menelusuri temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogya. Pansus tersebut ditargetkan berhasil melakukan penelusuran dalam kurun waktu dua bulan ke depan.

Ketua Pansus PAD DPRD Kota Yogya, Nasrul Khairi, pihaknya sudah menetapkan sejumlah agenda. Target paling dekat ialah mengundang unsur BPK RI Perwakilan DIY yang melakukan pemeriksaan terkait PAD Kota Yogya.

"Dengan adanya pansus, kami memiliki kewenangan melakukan klarifikasi. Setelah BPK, kami juga akan klarifikasi ke instansi terkait," tandasnya usai pengukuhan dalam sidang paripurna, Rabu (8/3).

Sebelumnya terdapat enam rekomendasi dari BPK RI atas temuan ketidakoptimalan pungutan PAD Kota Yogya 2016. Dari enam temuan tersebut, ada tiga kasus yang menjadi fokus utama pansus. Masing-masing ialah administrasi dalam pengelolaan pajak hotel dan

restoran, optimalisasi penagihan retribusi reklame, serta optimalisasi retribusi sampah.

Sedangkan instansi teknis yang bakal dipanggil pansus untuk tujuan klarifikasi ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya. "Kami spesifik menelusuri tiga rekomendasi yang diampu oleh BPKAD dan DLH. Tidak menutup kemungkinan jika dalam perkembangannya ada temuan baru, maka tetap akan kami tindaklanjuti," urainya.

Meski ketugasannya diberikan keleluasaan hingga Mei mendatang, namun menurut Nasrul akan dipercepat. Ditargetkan, kinerja pansus dapat dirampungkan pada pertengahan April. Hal ini agar masukan dari pansus dapat dijadikan pertimbangan instansi terkait dalam menyusun rencana kerja (renja) untuk tahun anggaran 2018. Sehingga kesalahan serupa yang menjadi temuan BPK RI tersebut tidak lagi terulang.

Sementara dari hasil pemetaan awal, persoalan utama PAD tersebut lebih disebabkan oleh penatausahaan atau administrasi wajib pajak. Dicontohkannya dalam retribusi sampah, data subjek retribusi yang dimiliki DLH masih manual. Hal itu menyebabkan kurang bayar sulit tertagih. "Pansus ini tidak untuk mena-

kut-nakuti. Kami hanya ingin memastikan rekomendasi dari BPK betul-betul dilaksanakan. Ini juga sangat penting karena dana transfer dari pusat banyak yang terkoreksi. Sehingga PAD menjadi andalan daerah," paparnya.

Kepala BPKAD Kota Yogya Kadri Renggono menyambut baik keputusan pembentukan pansus tersebut. Sejak awal pihaknya selalu terbuka dan berkomitmen melakukan perbaikan dalam optimalisasi pajak daerah.

Salah satu upaya untuk menekan celah kelemahan pajak daerah tersebut ialah dengan menerapkan sistem pembayaran online. Upaya tersebut juga telah ia usulkan melalui rancangan peraturan daerah terkait pajak online. "Dengan sistem online, maka besaran pajaknya sudah jelas setiap kali ada transaksi. Ketika nanti sudah diatur dalam perda, maka keputusannya mengikat," jelasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005